

A. BUKU

Adnan dan muhamad bin ahmad. *Rapor Merah Demokrasi*.(Bekasi: PT Darul Falah,2015).

A Dahl, Robert. *Analisa Politik Moddern*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1982).

Asshiddique, Jimly. *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Atmadja, I Dewa Gede. *Ilmu Negara*, “Sejarah. Konsep Negara dan KajianKenegaraan”. Cetakan Pertama. (Malang:Setera Press, 2017).

Davidson, Scoot. *Hak Asasi Manusia; Sejarah Teori dan Praktek dalam pergaulan Internasional*. (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1994).

El-Muhtaj, Majda. *Hak asasi manusia dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, Edisi kedua, 2017).

Fajar ND, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015).

Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. (Jakarta:Prenadamedia Group, 2018).

Kumkelo, Mujaid, dkk. *Fiqih Ham (Ortodoks dan Liberalisme Hak Asasi Manusia dalam Islam)*. (Malang: Setara Press, 2005).

Kusnardi, Moh dan Bintang R. Saragih. *Ilmu Negara*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008).

Kusnardi, Moh dan Hermaily Ibrahim. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan VII, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 1928).

Locke, Jhon. *The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*. (Oxford: Oxford Univeersity Press, 1964).

Librayanto, Romi. *Trias Politika dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. (Makassar: PuKAP Indonesia, 2008).

Manan, Bagir & Kuntana Magnar. *Mewujudkan Kedaulatan Rakyat Melalui Pemilihan Umum, dalam Bagir Manan (editor), Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*. (Bandung: Gramedia,1998).

Mangunsong, Nurainun. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Cetakan pertama. (Bandung: Penerbit Nuansa dan penerbit Nuansamedia, 2006).

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

Nasution, Adnan Buyung. *Arus Pemikiran Konstitusionalisme Tata Negara*. (Jakarta: Kata penerbit, 2007).

Ramiyanto dan Karyadin. *Ilmu Negara*. (Sleman: CV Budi Utama, 2020).

Rousseau, Jean Jackues. *The Social Contrac (perjanjian sosial), Edition Limited*. (Hertfordshire, Wordsworth 1998).

Rudy dan Charlyna Purba. *Dinamika Sengketa Pemilu di Indonesia*. (Jakarta: PT Nagakusuma Media Kreatif, 2004).

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan ke-3. (Jakarta: UI Press,1986).

Surbakti, Ramlan, dkk. *Perekayasa Sistem Pemilu untuk Pembangunan Tata Cara Politik Demokratis*. Cetakan Pertama, (Jakarta: Kemitraan, 2008).

Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia Widya Sarana, 1992).

Sabon, Max Boli. *Hukum Otonomi Daerah Edisi Kedua : Bahan Pendidikan untuk Perguruan Tinggi*. (Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2011).

Sjadzali, Munarwir. *Islam dan Tata Hukum Negara; Ajaran,Sejarah,dan Pemikiran*. Edisi Kelima, (Jakarta: UI Press, 1993).

Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*. Cetakan ke 2,(Jakarta;Sinar Grafika,2004).

B. JURNAL

Janpatar Simamora, “Perlindungan Hak Memilih Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara”, *Jurnal Yudisial*, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2013

Roy Marthen Moonte, “Kebebasan Hak Sosial Politik dan Parisipasi Warga Negara dalam Sistem Demokrasi Negara”, *Jurnal Ius Constitundum*, Volume 4 Nomor 2 Oktober 2019

Aji Lukman, “Analisis Yuridis Terhadap Penjatuhan Pidana Tambahan Pencabuta Hak Memilih dan Dipilih Dalam Jabatan Publik Djoko Susilo” ,*Jurnal Supremasi Hukum*, Volume.3,No.1,Juni2014

Rukmana Amanwinata, *Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul dalam Pasal 28 UUD 1945*, (Bandung: Disertasi Universitas Padjadjaran, 1996)

Sabungan Sibarani, “Analisis hukum mengenai pencabutan hak politik bagi koruptor berdasarkan sudut pandang Hak Asasi Manusia”, (Jakarta: Seminar Nasional, 2019)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)*

_____. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258)*

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974)*

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3615)*

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999
Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3886)*

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005
Tentang Pengesahan Internasional Covenant on Civil and Politic Rights
(Konvenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politic*

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6109)*

ARTIKEL

Anonim. “Hak dan Kewajiban Anggota Dewan Perwakilan Rakyat” diakses pada
12 Juni 2020 pada 17.11 WIB dari web [http://www.dpr.go.id/tentang/hak-
kewajiban](http://www.dpr.go.id/tentang/hak-kewajiban)

Tanggungjawab, <https://kbbi.web.id/> diakses pada 15 Mei 2020, jam 11.15 WIB.

Delvira Hutabarat, “KPU Rekomendasikan 2 Jenis Pemilu Serentak: Nasional dan
Daerah”, [https://www.liputan6.com/pileg/read/3948125/kpu-
rekomendasikan-2-jenis-pemilu-serentak-nasional-dan-daerah#](https://www.liputan6.com/pileg/read/3948125/kpu-rekomendasikan-2-jenis-pemilu-serentak-nasional-dan-daerah#), 29 April
2020

Maya Sari, “Jenis-Jenis Pemilu di Indonesia”, [https://gurupkn.com/jenis-jenis-
pemilu](https://gurupkn.com/jenis-jenis-pemilu), 29 April 2020

Heri Setiawan, “Ini Tujuan Pemilu yang Harus Kamu Pahami, Biar Nggak Golput
atau Asal Pilih”, [https://www.liputan6.com/citizen6/read/3871545/ini-
tujuan-pemilu-yang-harus-kamu-pahami-biar-nggak-golput-atau-asal-
pilih#](https://www.liputan6.com/citizen6/read/3871545/ini-tujuan-pemilu-yang-harus-kamu-pahami-biar-nggak-golput-atau-asal-pilih#), 29 April 2020

PUTUSAN

Indonesia. *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 225
PK/Pid.Sus/2017*